

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.



AKSARA TIMUR

HARMONI HUKUM INDONESIA



HARMONI HUKUM INDONESIA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan yang dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (5 Milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

HARMONI HUKUM INDONESIA

Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H

PENERBIT AKSARA TIMUR

HARMONI HUKUM INDONESIA

Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H

ISBN : 978-602-72177-2-0

Editor :

Firman, S.Pd.,M.Pd

Desain Sampul & Tata Letak

Sulaiman Sahabuddin, S.Pd.I

Penerbit :

Penerbit Aksara Timur

Alamat Kantor

Jl. Pajjaiyang Kumalasari Pintu II Blok AC No. 4 Daya Makassar
Sulawesi Selatan

Mobile Phone : 081141211449

E-mail : penerbitaksaratimur@gmail.com FB: Penerbit Aksara
Timur

Ukuran : 15 x 21 cm; Halaman : vi + 120

Cetakan Pertama, Februari 2015

Cetakan Kedua, April 2015

Cetakan Ketiga, Desember 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin dari penerbit

PRAKATA

Tiada kata yang patut terucap selain puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw, inspirator utama dalam kehidupan dunia hingga akhir zaman yang menjadi pedoman umat hingga ke alam akhirat.

Buku ini adalah pengembangan dari salah satu kegemaran penulis yaitu membuat tulisan-tulisan yang relevan dengan bidang keilmuan yang penulis dalami yaitu ilmu hukum. Substansi dari tulisan-tulisan tersebut adalah seputar fenomena hukum mulai dari aspek perilaku masyarakat hingga ke penegakan hukum. Seorang jurnalis TV5 Prancis, Patrick Boatet, mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri dengan sejuta paradoks namun penuh dengan antusiasme. Pernyataan tersebut dapat dimaknai betapa Indonesia seolah masih mencari jati diri sebagai sebuah negara menuju cita-cita besarnya yang termaktub di dalam konstitusi. Potret penegakan hukum di Indonesia yang banyak menyimpang sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, perilaku buruk aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dan budaya hukum masyarakat yang menuntut suatu ketertiban hukum dan penegakan hukum yang adil, namun bila menyangkut kepentingannya, selalu berupaya mencari celah agar terhindar dari masalah hukum, salah satunya dengan jalan menyuap aparat.

Substansi dari buku ini terdiri atas empat tema besar yaitu: Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Hukum Internasional dan HAM, Tindak Pidana Korupsi, dan Pendidikan

Sekelumit pemikiran yang ada dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam membentuk sebuah harmoni hukum menuju negeri beradab. Tiada tujuan negara yang lebih mulia selain mewujudkan negeri Indonesia yang *Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur*.

Penulis

SAMBUTAN

Rektor IAIN Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan karuniaNya seraya menghaturkan Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw.

Saya menyambut baik dan mengapresiasi upaya Saudara penulis hingga terbitnya buku ini, ketekunan saudara penulis dapat dilihat dari konsistensinya dalam membuat karya-karya ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat dinamis dengan karakteristiknya yang khas dan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Meskipun demikian, hukum itu sendiri bersifat universal sehingga siapapun dapat berkomentar dan berpendapat tentang hukum khususnya mengenai persoalan-persoalan hukum yang sedang hangat diperbincangkan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah hasil kolaborasi antara ilmu hukum dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Saya berharap buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk menambah wawasan dalam cakrawala hukum di Indonesia serta dapat berkontribusi dalam menciptakan tertib hukum dan sosial di masyarakat, Aamiin, Insya Allah.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palopo, 20 Januari 2015
Rektor

Dr. Abdul Pirol, M.Ag

SAMBUTAN

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Palopo

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatub,

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah swt atas segala nikmat dan karunianyaNya seraya tak lupa menghaturkan Shalawat dan Salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw sebagai suri tauladan manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat, Insya Allah.

Sebagai pimpinan, saya menyambut baik prakarsa Saudara Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H untuk menerbitkan buku yang berjudul: *Harmoni Hukum Indonesia*. Fenomena hukum dalam masyarakat memang menjadi tema yang menarik untuk dikaji dalam berbagai macam pendekatan. Hukum sebagai kaidah sosial dan moral seharusnya senantiasa terpatrit dalam hati sanubari masyarakat untuk terciptanya suatu kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Masyarakat Madani hanya akan terwujud apabila bangsa Indonesia hidup dalam harmoni yang bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional yang menjadi amanat konstitusi.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Saudara penulis, semoga hasil karya ini menambah khazanah referensi bagi para pemerhati hukum. Teruslah berkarya sebagai seorang ilmuwan hukum untuk berkontribusi mewujudkan negeri yang harmoni. *Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatub*

Palopo, 23 Januari 2015
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Mustaming, M.Ag.

**Tiada tujuan negara yang lebih mulia selain
mewujudkan negeri Indonesia yang
*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur..***

(Muammar Arafat)

Untuk Istri anak-anakku tersayang:
Ny. Rina Muammar

Muhammad Saleh Ananda Muammar (Alm)

Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda Muammar

DAFTAR ISI

Prakata	v
Sambutan Rektor IAIN Palopo	vii
Sambutan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo	viii
Daftar Isi	xi
HUKUM, PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	1
1. Resolusi Bangsa untuk 2015	3
2. Berjaya di Laut	9
3. Menakar Demokratisasi Sistem Pilkada	15
4. Perlindungan Hukum Sektor Jasa Keuangan	23
5. Dari Zona Nyaman ke Zona Kompetitif	29
HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	35
1. Hak Asasi VS Kewajiban Asasi	37
2. Kejahatan Israel dan Penegakan Hukum Internasional	43
3. Pembebasan Bersyarat yang Melukai Rakyat..	49
4. Boykot Israel Ala Belanda	55
5. Ketika Menghina Presiden Tak Tabu Lagi	61
TINDAK PIDANA KORUPSI	67
1. Seremoni Pakta Integritas	69
2. Tertangkap Tangan	75
3. Pemimpin Baru MK dan Harapan Rakyat	81

4.	Pembalikan Beban Pembuktian pada perkara Tipikor	87
5.	Memaknai Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tipikor	93
PENDIDIKAN		103
1.	Ospek dan Memuliakan Manusia	105
2.	Pendidikan Indonesia dan Daya Saing Bangsa	111
Tentang Penulis		119

Tentang Penulis



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, lahir di Jambi, 18 November 1973, putra kedua dari ayah (Papy) HMS. Yusmad, S.H dan Ibu (Bunda) Ny. Hj. Andi Nuryanti Yusmad. Menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993. Tamat pendidikan sarjana pada tahun 1998. Tahun 2005 melanjutkan pendidikan pada jenjang pascasarjana Magister Hukum (S.2) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada jenjang doktoral (S.3) pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan memperoleh predikat ***Cumlaude*** dari almamaternya dan menjadi wisudawan terbaik.

Buku yang ditulis ini adalah implementasi dari kegemarannya menulis artikel yang dimuat di media cetak Jawa Pos Grup yaitu harian “Palopo Pos” dan harian “Fajar” yang terbit di Makassar. Sejumlah karyanya yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yaitu Jurnal Hukum dan Syariah “*Al-Ahkam*”, Jurnal Ekonomi Syariah “*Muamalah*” di IAIN Palopo dan Jurnal Hukum “*ADIL*” Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta serta dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh LPK. STAIN Palopo. Pengalaman menulis artikel dan opini hukum dimulainya sejak

tahun 2006 dan menulis masih menjadi aktifitas rutinnya hingga sekarang.

Ia menikah dengan Ny. Rina Muammar dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Saleh Ananda Muammar (almarhum) dan Muhammad Abdal Mukhtarif Ananda Muammar. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan dosen tetap Program Pascasarjana IAIN Palopo. Selain di IAIN Palopo ia juga mengajar di perguruan tinggi lain yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo. Pengalaman jabatan di kampus yang pernah diamanahkan adalah: Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2007-2008, Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2008-2009 dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2013 sampai 2015. Saat ini ia diamanahkan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan (Wadek I) Fakultas Syariah IAIN Palopo. Pengalaman luar negerinya cukup banyak dengan merasakan ‘atmosfer akademik’ melalui kegiatan *sandwich international program* dan *international seminar* di negara lain seperti di Belanda, Belgia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Aktifitas di luar kampus antara lain adalah aktif sebagai anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan anggota Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Kontak yang dapat dihubungi adalah melalui PIN BB: 51280653 dan email: muammar.arafat@yahoo.co.id.

HUKUM DAN PEMBANGUNAN



Sumber gambar: <http://2.bp.blogspot.com/-IvNodUyRXLU/UUGfOPg3MGI/AAAAAAAAACKe/1rN-YITiKqs/s1600/Lelang+Jabatan.jpg>

RESOLUSI BANGSA UNTUK 2015

Tahun 2014 segera berlalu dan tak akan kembali lagi. Biasanya di akhir tahun seperti ini banyak rencana masa depan yang mulai dirajut, berjuta harapan dan impian untuk kehidupan yang lebih baik mulai ditekankan. Tentunya tak ada yang ingin mundur ke belakang meski kehidupan yang pahit sekalipun seolah enggan meninggalkan. *The show must go on !!* demikian tekad bagi mereka yang hidup dengan optimisme tinggi. Ketegaran dalam menapaki hidup adalah syarat untuk tetap bertahan dalam jati diri untuk menjadi manusia unggul dan diperhitungkan. “*Tabun ini tabun yang hebat! Terima kasih telah menjadi bagian bersamanya*” demikian sebuah situs sosial media terbesar di dunia

memberikan *tagline* akhir tahun dalam memberikan layanan kaleideskop foto bagi para penggunanya.

Tahun 2014 telah dilalui dengan segala dinamikanya. Di tahun ini banyak catatan sejarah yang ditorehkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pergantian pucuk pimpinan nasional terjadi dengan tampilnya sosok pemimpin baru yang bertekad mewujudkan Indonesia hebat dengan semangat kerja, kerja dan kerja. Dalam bidang penegakan hukum, tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkoba sebagai *the extra ordinary crime* masih menyisakan pekerjaan rumah bagi aparat untuk segera diselesaikan. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini masih ada pejabat yang terjerat kasus korupsi dan tertangkap melalui sebuah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Demikian pula pengguna, pengedar dan bandar narkoba sudah banyak yang tertangkap, namun anehnya dari balik tembok penjara seorang bandar besar narkoba dengan leluasa mengendalikan bisnis penjualan barang haram tersebut. Sungguh sangat ironis.

Menarik untuk dicermati “tudingan” dari sebuah lembaga asing bahwa Indonesia dianggap sebagai salah satu negara gagal (*failed state*) di dunia. Negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab mendasar sebagai sebuah negara berdaulat. Memang tidak ada definisi khusus tentang pengertian negara

gagal, namun menurut *fund for peace* ciri-ciri sebuah negara gagal adalah: Kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri, tergerusnya kewenangan yang sah dalam membuat keputusan bersama, gagal dalam penyediaan layanan publik, dan tidak mampu berinteraksi secara penuh sebagai negara berdaulat dengan komunitas internasional. Faktanya memang terlihat bahwa di usianya yang ke-69 tahun, Indonesia masih kesulitan dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Pemerintah masih terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Namun demikian, tidaklah pantas bila kondisi nasional tersebut membuat Indonesia mendapatkan predikat negara gagal.

Menyongsong tahun baru 2015, rencana-rencana (baik) yang telah disusun harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Revolusi mental pada hakikatnya adalah kebulatan tekad untuk melakukan perubahan besar atas *mindset* yang ada pada diri manusia ke arah yang lebih baik. Diperlukan komitmen yang kuat dan konsistensi untuk mewujudkannya. Setiap pergantian tahun hijriyah kita selalu diingatkan akan sebuah peristiwa penting yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah monumental bagi umat Islam. Peristiwa hijrah itu mengandung hikmah

semangat perjuangan disertai optimisme yang tinggi untuk berhijrah dari hal-hal yang buruk menuju kehidupan yang lebih baik.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia harus menjadi sebuah negara yang unggul dan diperhitungkan pada level internasional. Diperlukan komitmen besar segenap elemen bangsa untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadaban. Revolusi mental harus diikuti oleh sebuah resolusi bangsa untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Korupsi dan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa pula. Patut dikatakan sebuah resolusi bila KPK ingin mempercepat agenda nasional pemberantasan korupsi dengan rencana membuka kantor cabang KPK di daerah. Demikian pula patut diacungi jempol langkah Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi para terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba yang permohonan grasinya telah ditolak oleh Presiden. Tindakan tegas di laut bagi kapal-kapal asing pencuri ikan dan pendaratan paksa pesawat asing yang melintasi wilayah udara nasional tanpa izin adalah bagian dari upaya untuk menunjukkan kedaulatan NKRI pada dunia internasional.

Individu dan masyarakat sebagai bagian dari warga negara turut bertanggung jawab bagi

terwujudnya resolusi bangsa untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Caranya adalah dengan menjadi warga negara yang baik dan partisipatif (*civic participation*) yang responsif atas perubahan dan yang terpenting adalah menjadi warga negara yang baik dan beradab (*smart and good citizen*) yang diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Jangan selalu mengatakan masih ada waktu, jangan tunda lagi lakukanlah segera dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat bagi orang lain.

BERJAYA DI LAUT

Tindakan tegas Presiden R.I, Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia menimbulkan beragam tanggapan baik di dalam maupun di luar negeri. Sebut saja di Malaysia, sontak pernyataan Presiden Jokowi memantik reaksi keras di negeri jiran tersebut. Pemimpin Malaysia menganggap tindakan tersebut arogan dan angkuh, demikian pula beberapa media di Malaysia menuding Jokowi hendak membuat konfrontasi secara terbuka dengan Malaysia. Reaksi dari dalam negeri seperti biasa, langkah tegas di bidang kemaritiman ini dinilai tak lebih dari upaya

pencitraan belaka yang tidak akan menjadi sebuah kebijakan yang berkelanjutan.

Pemerintah membuktikan ucapannya. Sebagai langkah awal, pada Jumat (5/12) lalu tiga kapal nelayan asing berbendera Vietnam akhirnya ditenggelamkan. Pengenggelaman kapal nelayan asing itu dilakukan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Tindakan tegas Pemerintah menenggelamkan kapal nelayan asing yang memasuki yurisdiksi Indonesia dan mengambil kekayaan lautnya telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) dan (4) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jelas disebutkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya terhadap kapal tersebut dapat dilakukan tindakan khusus seperti pembakaran dan/atau penenggelaman berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Disadari bahwa langkah tegas Pemerintah ini berpotensi mengganggu hubungan Indonesia

dengan negara-negara lain khususnya negara tetangga. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Seri Zahrain Mohamed Hasyim mengakui bahwa publik di Malaysia memang agak gerah dengan kebijakan Pemerintah R.I. Dubes Malaysia menyatakan memang kondisinya dahulu agak berbeda dengan sekarang. Dulu pengawasan di laut Indonesia memang longgar sehingga nelayan Malaysia lebih 'rileks' (leluasa) mengambil ikan di wilayah Indonesia. Saat ini pengawasan lebih ketat, dan Dubes Dato' Zahrain meminta nelayan Malaysia untuk tidak memasuki perairan Indonesia seraya meminta aparat TNI-AL dan pengawas perikanan tidak langsung menangkap kapal nelayan Malaysia tetapi lebih baik dengan menghalaunya kembali ke wilayah perairan Malaysia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai kebijakan ini memang akan berpengaruh pada hubungan antar negara namun tidak akan berlangsung lama seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak yang berseberangan dengan kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan Pemerintah menenggelamkan kapal nelayan asing tetap sah dilakukan karena memiliki dasar hukum yang kuat dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kapal-kapal asing itu sudah

jelas telah memasuki wilayah perairan Indonesia sehingga negara-negara lain harus memahami bahwa Indonesia sangat dirugikan secara signifikan atas kejahatan yang mereka lakukan. Pembiaran terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia.

Selain langkah tegas menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia, Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pencurian Ikan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pembentukan satgas ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran aturan penangkapan perikanan. Satgas ini dipimpin oleh Mas Achmad Santosa dari Deputy Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan anggota-anggotanya terdiri atas unsur-unsur lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan, Bareskrim Mabes Polri, PPATK dan kemenhub. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan Indonesia mengalami potensi kerugian yang sangat besar akibat praktik *illegal fishing* ini mengingat kemampuan kapal asing dalam menangkap ikan dengan jumlah yang sangat besar. Belum lagi terjadinya tindakan *transshipment* atau alih muatan kapal di tengah laut yang jelas

berindikasi kuat terjadinya praktik IUU *fishing* (*illegal unreported and unregulated fishing*) atau pencurian ikan.

Sudah saatnya kedaulatan negara ditegakkan di lautan kita agar para nelayan Indonesia menjadi ‘tuan rumah’ di lautnya sendiri. Tidak terbayang sedihnya jika nelayan Indonesia tidak dapat menikmati hasil lautnya karena mahalnya harga ikan. Kini, langkah tegas Pemerintah di bidang perikanan dan kelautan mulai membuahkan hasil. Nelayan Aceh tidak lagi melihat kapal-kapal dari Thailand memasuki wilayah Indonesia. Harga ikan di negara tetangga mulai mahal karena kurangnya pasokan dari nelayan. Kabar baik datang dari nelayan di Medan, “*terima kasih bu Susi, sekarang ikan tenggiri murah, biasanya kita tidak bisa makan ikan tenggiri karena harganya yang mahal sekali*”. Berdaulatlah negeriku atas lautmu, *Jalesveva Jayamabe* !!

MENAKAR DEMOKRATISASI SISTEM PILKADA

Usai sudah pertarungan sengit dua kekuatan politik di tanah air yang berbeda kepentingan tentang sistem pemilihan umum kepala daerah. Melalui perdebatan alot hingga dinihari dan nyaris terjadi kericuhan, akhirnya Sidang paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) harus ditempuh dengan mekanisme pemungutan suara (voting) setelah berbagai upaya yang dilakukan seperti skroking sidang dan lobi antar fraksi tidak membuahkan hasil. Partai Demokrat memilih '*walk out*' setelah opsi pilkada langsung dengan 10 item koreksi tidak terakomodir. Hasil pemungutan suara

secara terbuka menunjukkan 226 suara anggota DPR memilih opsi pilkada melalui DPRD dan 135 memilih pilkada langsung. Sidang paripurna tersebut mencatatkan rekor tingkat kehadiran tertinggi yaitu sebanyak 486 anggota hadir dari total 550 anggota dewan.

Masing-masing pihak berkeyakinan bahwa sistem pilkada menurut pilihan mereka adalah yang paling benar dengan segala macam argumen yang dikemukakan. Tentu saja kedua pihak tersebut tidak mau disebut tidak demokratis sebab keduanya meng-klaim diri bertindak untuk dan atas nama rakyat. Memang disadari bahwa proses demokratisasi pada suatu sistem pemerintahan khususnya sistem pemilihan umum kepala daerah tidaklah mudah. Di sisi lain perubahan sistem yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem terdahulu demi menyesuaikan dengan perubahan secara global selalu mendapat respon yang berbeda. Ada pihak yang menginginkan perubahan terus menerus dan adapula pihak yang masih menginginkan penerapan pola lama.

Menurut mantan Presiden R.I ke-3 B.J Habibie, Demokratisasi adalah sebuah perubahan baik itu secara perlahan maupun cepat ke arah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima

adalah balkanisasi, perang saudara dengan pertumpahan darah dan kemunduran ekonomi yang sangat parah. Pernyataan B.J Habibie tersebut seolah telah menjadi kenyataan dengan keadaan saat ini. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyebab dari kesemuanya itu adalah pilkada secara langsung? Tentu masih perlu pengkajian dengan nalar demokratis segenap komponen bangsa.

Sistem pilkada langsung dan melalui DPRD sesungguhnya merupakan proses demokratisasi itu sendiri. Demokratisasi sebagai perubahan tentu sejalan dengan keinginan bangsa untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman pada 'konsensus nasional' tentang sistem ketatanegaraan yang telah disepakati segenap elemen bangsa dalam konstitusi. Kedua sistem pilkada tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilkada langsung menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan mereka diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang pantas untuk memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Pilkada langsung membuat suasana pesta demokrasi di daerah menjadi ramai, riuh rendah dan dinamis. Geliat perekonomian masyarakat semakin terasa seperti usaha advertising, percetakan dan sablon menerima banyak orderan dari kontestan pilkada

untuk keperluan kampanye, warung-warung kopi menjadi ramai dengan obrolan politik para pengunjungnya. Media cetak, media elektronik seperti tv, radio dan media online, demikian pula lembaga-lembaga survei, para pengamat politik hingga advokat tidak ketinggalan ikut mendapatkan lahan rezeki. Wajarlah jika banyak pihak tidak setuju dengan wacana pengalihan pilkada langsung ke pilkada DPRD.

Dampak negatif dari pilkada langsung yang dirasakan adalah terjadinya ‘pengkotak-kotakan’ masyarakat pada suatu kekuatan politik tertentu, melibatkan PNS baik secara terselubung maupun terang-terangan untuk memilih calon tertentu, biaya pilkada yang mahal baik dari segi penyelenggaraan yang menjadi beban negara maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon kepala daerah. Pemilihan langsung juga rawan terhadap praktik jual beli suara. Para pemimpin daerah yang dihasilkan oleh sistem pilkada seperti ini berpotensi menjadi kepala daerah yang berperilaku koruptif dengan melakukan penyelewangan dana APBD, penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan dan terlibat tindak pidana pencucian uang.

Bagaimana dengan pilkada melalui DPRD? Menurut pendukung opsi ini, pilkada melalui lembaga perwakilan rakyat akan menghemat anggaran negara, menjauhkan masyarakat dari

konflik horizontal dan menghindari lahirnya pemimpin daerah yang korup karena telah mengeluarkan dana yang besar selama pencalonan kepala daerah. Dampak negatif dari pilkada melalui DPRD adalah hilangnya kesempatan bagi anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin daerah yang baik karena terganjal aturan tentang syarat pencalonan. Pilkada melalui DPRD juga bukan jaminan akan melahirkan pemimpin yang “steril” dari perbuatan korupsi, karena proses pencalonan menjadi kepala daerah telah melalui *deal-deal* tertentu dengan anggota DPRD sehingga sebelum dan sesudah pilkada, calon kepala daerah harus rela menjadi ‘ATM’ dari anggota DPRD yang menurut istilah lain dari Ahok, Wakil Gubernur DKI adalah menjadi ‘budak’ DPRD. Sungguh ironis bila itu menjadi kenyataan.

Fakta menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung telah banyak melahirkan pemimpin daerah yang tersangkut kasus korupsi, namun demikian pemimpin daerah yang cemerlang, berprestasi secara nasional dan internasional juga dilahirkan melalui proses pilkada langsung. Sebut saja Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Basuki Tjahaya Purnama (Wakil Gubernur DKI Jakarta), dan yang paling fenomenal adalah Joko Widodo, Presiden RI terpilih yang pernah menjabat sebagai Walikota

Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Mereka-mereka itu dikenal sebagai pemimpin daerah yang sederhana, dekat dengan rakyat dan senantiasa ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya.

Pengesahan RUU Pilkada yang telah memutuskan pilkada melalui DPRD harus diterima sebagai kenyataan bahwa seluruh rangkaian dalam proses pembuatan undang-undang mulai dari tahapan prolegnas, pembahasan dan pengesahan telah sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Keputusan untuk melakukan pilkada melalui DPRD hendaknya dipahami sebagai sebuah proses demokratisasi dalam sistem pemilihan kepala daerah, bagaimanapun dinamikanya. Setelah pengesahan RUU Pilkada ini, semua pihak hendaknya *'cooling down'* untuk menenangkan suasana hati yang menegangkan ini. Kembalilah menghayati dan mengamalkan sila keempat Pancasila: *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan*, dengan menghormati setiap keputusan yang dicapai melalui musyawarah, meskipun hasilnya melalui mekanisme voting.

Masih terbentang jalan yuridis nan elegan yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pengesahan RUU Pilkada ini. Setelah Presiden menandatangani pengesahan undang-undang Pilkada dan dimuat dalam lembaran

negara, Mahkamah Konstitusi siap menerima gugatan uji materil kepatuhan materi muatan Undang-undang Pilkada ini terhadap UUD 1945. Demokratisasi masih terus berproses! (*)

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Apakah anda pernah bermasalah dengan klaim asuransi, investasi bodong dengan janji keuntungan besar atau cicilan kredit, penawaran fiktif? Ataupun anda meragukan kerjasama anda dengan lembaga jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan dana pensiun? Bila iya, segeralah melaporkannya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan yang diatur dalam UURI No. 21 Tahun 2011 tentang

OJK. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terjadinya globalisasi dalam sistem keuangan dan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta berbagai inovasi dan kreasi dalam sektor finansial telah menciptakan sebuah sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Interaksi dan transaksi dalam antar lembaga jasa keuangan semakin kompleks dan dipengaruhi oleh hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah “*moral hazard*” dan pengabaian terhadap perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan.

Amanat UURI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan

jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Untuk sektor Perbankan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran dari para pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan seperti lembaga perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dana pensiun dan sektor pembiayaan lainnya akan semakin meningkat. Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan edukasi dan layanan informasi seperti pengenalan karakteristik sebuah lembaga jasa keuangan dan produk-produk yang dikeluarkannya. Apabila produk dan layanan sebuah lembaga jasa keuangan berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK berwenang untuk menghentikan kegiatannya.

OJK telah menyiapkan sistem pelayanan dan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan memfasilitasi pengaduan konsumen. Masyarakat hendaknya memanfaatkan layanan konsumen ini sebaik mungkin. Namun demikian, sebelum melakukan pengaduan ke OJK sebaiknya konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha berupaya untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dulu dengan lembaga jasa keuangan (LJK) dimaksud. Contohnya, konsumen telah melunasi cicilan namun agunan masih ditahan oleh lembaga jasa keuangan. Apabila masalah konsumen dengan LJK belum selesai, maka konsumen dapat melaporkannya pada layanan konsumen OJK. Pengaduan konsumen dapat dikirim melalui Pos, fax, telepon atau membuka *website* OJK dan mengirimkan *e-mail* pengaduan. OJK hanya akan memproses pengaduan dengan informasi dari konsumen yang jelas dan akurat seperti adanya bukti penyampaian pengaduan pada LJK, identitas diri pelapor, deskripsi pengaduan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip perlindungan

konsumen menurut ketentuan ini adalah keterbukaan (transparansi), perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi dari konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Peraturan OJK ini banyak mengatur tentang kewajiban pelaku usaha seperti kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha dan kewajiban untuk menjaga keamanan simpanan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan. Pelaku usaha juga dilarang memberikan data informasi apapun tentang konsumennya kepada pihak ketiga kecuali dalam hal diwajibkan oleh undang-undang. Bagi pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak yang melanggar peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, membayar denda sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.

Perlindungan hukum konsumen pada sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, memberdayakan konsumen, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen dengan memperhatikan aspek kewajaran dalam

penetapan biaya atau harga atas sebuah produk (*fee-based pricing*) minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Sudah saatnya konsumen dan masyarakat sadar dan tanggap atas hak-haknya pada lembaga jasa keuangan. Makna filosofis dari perlindungan konsumen ini adalah industri keuangan akan mendapat manfaat positif untuk memacu peningkatan efisiensi dan merespon tuntutan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam bidang jasa keuangan yang pada gilirannya akan meningkatkan utilitas dan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia (*financial well-literate*).

DARI ZONA NYAMAN KE ZONA KOMPETITIF

(from the comfort zone to the competitive zone)

Ini adalah sebuah terobosan baru yang digulirkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo. Lelang Jabatan! Sejauh ini pasangan Jokowi dan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memang terciptakan sebagai pasangan pemimpin yang pro rakyat dan penuh dengan ide-ide cemerlang yang terkadang bertentangan dengan kelaziman yang ada yang bertujuan untuk percepatan kesejahteraan rakyat. Wajarlah bila sebuah stasiun televisi terkemuka nasional dalam memberitakan kegiatan-

kegiatan gubernur Jakarta tersebut selalu mengawali dengan istilah “Gebrakan Jokowi”.

Akselerasi birokrasi dan ritme kerja mulai dari lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga para walikota di jajarannya semakin dipercepat. Setelah dilantik, bahkan pelantikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), langsung kerja dan dievaluasi secara berkala sehingga tingkat kinerja Pemerintahan dapat terukur. Dalam waktu dekat ini gubernur Jokowi berencana untuk melakukan sebuah terobosan birokrasi dengan mengadakan lelang jabatan untuk posisi Lurah dan Camat. Melalui cara ini diharapkan akan membuat para pejabat lebih aktif dalam menjalankan program-program pemerintahan. Jika program yang telah dijanjikan tidak terwujud, maka pejabat tersebut dicopot dan posisinya diisi oleh pejabat baru.

Mekanisme lelang jabatan diawali dengan penyampaian *Proposal Performance Plan* yang merupakan sebuah usulan dan daftar rencana program kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya proposal yang diajukan tersebut akan diperiksa dengan menggunakan *Customer Service Index* (CSI). Menurut Jokowi, survey pendahuluan penting untuk dilakukan agar Pemerintah memiliki bahan dan dapat mengantisipasi bilamana ada pendaftar yang punya performa yang kurang baik. Oleh karena itulah

maka rekomendasi indeks pelayanan masyarakat ini sangat menentukan. Peserta lelang jabatan pada saat ini masih diperuntukkan bagi jabatan Lurah dan Camat dan hanya dapat diikuti oleh PNS yang jenjang kepangkatannya sudah memungkinkan menurut aturan kepegawaian yang berlaku.

Selanjutnya, sistem dan mekanisme pelelangan jabatan ini akan segera disiapkan. Setidaknya, ada tiga kriteria dalam memilih lurah dan camat yang baru melalui proses lelang. *Pertama*, calon harus memiliki program kerja yang jelas dan terukur. Harus ada janji dan komitmen untuk melaksanakan janji-janji tersebut dan kalau tidak tercapai bersedia dicopot. *Kedua*, calon harus memiliki kemampuan akademis yang baik dan yang tak kalah pentingnya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini bertujuan agar program-programnya dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. *Ketiga*, calon harus sehat jasmani dan rohani, tidak sakit-sakitan dan menurut istilah Jokowi harus dapat “berlari kencang” sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi DKI saat ini.

Rencana lelang jabatan oleh Gubernur DKI Jakarta ini tentunya cukup mengejutkan banyak pihak. Maklum, selama ini telah menjadi kelaziman bahwa untuk pengisian sebuah jabatan dalam lingkup pemerintahan telah menjadi kewenangan

dari tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekda dibantu oleh beberapa pejabat SKPD terkait. Langkah yang ditempuh oleh Jokowi ini mendapatkan dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Sebelumnya Kemenpan RB pernah menerapkannya untuk mengisi jabatan eselon I dan II. Kebijakan lelang jabatan ini subsatansinya telah diatur dalam Surat Edaran Menpan dan RB No. 16 tahun 2012 tentang 'Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Masih Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Kebijakan lelang jabatan dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Menpan dan RB telah sejalan dengan rencana percepatan reformasi birokrasi yang telah menjadi program Pemerintah. Sesungguhnya terobosan yang terlihat di sini adalah dilakukannya sebuah "variasi" dalam memasukkan para PNS yang memenuhi syarat formal untuk ikut berkompetisi dalam mengisi sebuah jabatan tanpa harus menunggu usulan dari tim Baperjakat. Tentunya dapat dibayangkan bila kebijakan ini jadi dilaksanakan akan memberikan spirit dan motivasi yang tinggi bagi para PNS untuk menunjukkan kinerjanya dan memberikan

kemampuan terbaiknya dalam pengelolaan birokrasi pada level lurah dan camat.

Selama ini posisi lurah dan camat apalagi pada lingkup Pemprov DKI Jakarta adalah sebuah posisi sangat bergengsi dan membuat para pejabatnya berada pada sebuah “zona nyaman” (*comfort zone*) yang menurut sebuah iklan perusahaan meubel “Kalau sudah duduk lupa berdiri”. Dengan adanya lelang jabatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa zona nyaman tersebut tak lagi nyaman dan kini beralih menjadi “zona kompetitif” (*competitive zone*) dimana para pejabat harus bertindak cepat untuk rakyat.

Menatap keadaan aparat birokrasi daerah sebagai penyelenggara Negara di Kota Palopo tercinta ini, Penulis menghela nafas panjang (yang penuh makna) dan berpengharapan: Apakah model lelang jabatan seperti ini bisa dilakukan pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sehingga para pejabatnya dapat selalu berada pada zona kompetitif? Penulis berkeyakinan, dengan sebuah formulasi yang “serupa tapi tak sama”, Pemerintah Kota Palopo dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang menyejahterakan rakyatnya. *Ayo, jangan ketinggalan dong*, semoga Walikota dapat mewujudkannya. (*)

HUKUM INTERNASIONAL DAN HAM



Sumber gambar: <http://1.bp.blogspot.com/-hHj7ggxgv20/UggJBfNiBwI/AAAAAAAAADcU/E9JYZDhxxgY/s400/10.jpg>

HAK ASASI VS KEWAJIBAN ASASI

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum di masyarakat maupun yang proses hukumnya telah bergulir di pengadilan. Di Amerika Serikat dan Kanada misalnya, penduduk di negara tersebut punya “kebiasaan” untuk berurusan dengan pengadilan bila hak-haknya sebagai warga negara dilanggar. Apabila seorang warga negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga negara atau merasa dirugikan oleh kebijakan Pemerintah, mereka dengan mudah mengatakan: ‘*see you in the court*’ atau sampai jumpa di Pengadilan. Begitulah cara sebagian mereka dalam upaya

menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di negaranya.

HAM adalah hak-hak yg dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam Pasal 3 disebutkan: Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi (*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*). Di Indonesia, HAM diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28 I. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan yang menjadi asas-asas dasarnya adalah negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

Isu seputar HAM tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai mahluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga

keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya HAM. Contoh kewajiban asasi dalam kehidupan antara lain menghormati hak-hak orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikan kewajiban.

Patut disadari bahwa di balik pelanggaran HAM pasti ada pengabaian atas kewajiban asasi. Pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain. Kasus penyekapan pembantu rumah tangga yang terjadi di Medan dan Jakarta adalah bukti atas pelanggaran HAM sekaligus pengabaian kewajiban asasi manusia. Negara wajib hadir untuk membela para pembantu rumah tangga yang hak asasinya direnggut dan memberikan hukuman bagi para pelaku. Melalui keberlakuan UURI No. 5 Tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan

atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*international convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*)

Tentunya pembaca masih ingat peristiwa tsunami di Jepang tahun 2011. Melalui tayangan televisi dapat disaksikan, meskipun dalam suasana hiruk-pikuk kekalutan dan kesedihan serta di tengah keterbatasan infrastruktur yang sebagian besar rusak karena bencana tsunami, rakyat Jepang dengan tertib dan teratur dalam antrian panjang mengisi bbm di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Mereka ingin haknya terpenuhi dengan tidak merugikan hak-hak orang lain. Di Indonesia, dengan segala dinamikanya penegakan HAM selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dan diperjuangkan, namun sangat jarang dijumpai pembicaraan serius tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban asasi. Diperlukan komitmen yang kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang berkeadaban.

Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan dan penghargaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara vertikal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk ketaatan manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya untuk selalu

menyeimbangkan hak dan kewajiban serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hak asasi dan kewajiban asasi harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ini bukan tentang aku atau kamu, tapi ini tentang kita. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban asasi hari ini, atau masih sibuk menghitung hak-hak yang harus dipenuhi orang lain atas diri kita? Laksanakan kewajiban anda sebaik mungkin, insya Allah hak-hak itu akan terpenuhi. Jika itu dilakukan, sesungguhnya anda pantas untuk sebuah predikat “*The real khalifah fil ardhi.*”

KEJAHATAN ISRAEL DAN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pertumpahan darah terus terjadi di Gaza, Palestina dan telah menelan banyak korban jiwa. Lebih dari 1650 rakyat Palestina tewas dan sekitar 3640 korban luka dalam konflik berkepanjangan tersebut. Kekejaman Israel masih berlanjut dan secara brutal terus membombardir wilayah Gaza, menyerang seluruh objek seperti terowongan yang berfungsi sebagai jalur suplai logistik, pangan dan obat-obatan, permukiman penduduk, rumah sakit, termasuk sekolah yang didirikan PBB di Kota Rafah di Selatan Gaza. Juru bicara badan PBB untuk Palestina (UNRWA) Chris Gunnes melalui akun *twitter*nya menyatakan Penembakan atas sekolah

UNRWA di Rafah, telah mengakibatkan korban tewas dan luka-luka. Sekolah PBB itu menampung ribuan pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel ke wilayah permukiman penduduk.

Fakta sejarah jelas menggambarkan bahwa bangsa Yahudi yang kemudian mendirikan negara Israel adalah “*illegal immigrant*” datang ke wilayah Palestina atas bantuan Inggris setelah mereka dibantai di Eropa oleh gerakan anti Yahudi. Adalah Theodore Herzl (1860), seorang Yahudi Hongaria, tokoh utama zionis yang mempropagandakan perlunya ‘tanah air’ baru bagi mereka. Deklarasi *Balfour* 2 November 1917 yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur James Balfour adalah surat yang ditujukan kepada Rotschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris yang berisi persetujuan Pemerintah Inggris atas rencana zionis menjadikan Palestina sebagai tanah air baru bagi mereka. Deklarasi Balfour memberi syarat, bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak komunitas setempat. Rakyat Palestina menerima kedatangan bangsa Yahudi untuk hidup berdampingan dengan mereka. Ketentuan Deklarasi Balfour dilanggar, kaum Yahudi justru menjadi penjajah warga Palestina dan kemudian mendirikan negara Israel pada 14 Mei 1948. Kekejaman Israel terus terjadi hingga saat ini

dan hanya tersisa wilayah Gaza sebagai permukiman warga yang belum ditaklukkan secara utuh.

Berbagai seruan dunia untuk menghentikan serangan membabi-butakan ke jalur Gaza, dianggap sepi oleh Israel. Para pemimpin dunia hanya bisa mengecam dan mengutuk keras tindakan keji dan brutal tersebut. Presiden Prancis Francois Hollande mengutuk keras kebiadaban Israel, Sekjen PBB Ban Ki-Moon mengutuk serangan Israel atas sebuah sekolah di Jabaliya yang menewaskan 16 warga sipil. Presiden SBY mengecam keras serangan Israel dan menyebutnya sebagai serangan atas kemanusiaan. Duta Besar Palestina untuk RI, Maen Rashid Areikat memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI atas dukungan konkrit pada Palestina. Menurutnya, upaya SBY untuk berkomunikasi dengan Presiden Iran, Sekjen PBB dan Presiden Palestina adalah bentuk dukungan Indonesia yang selalu berada pada garis terdepan dalam setiap perjuangan bangsa Palestina.

Fenomena hukum yang “*tajam ke bawah namun tumpul ke atas*” sepertinya berlaku pula dalam konteks hukum internasional. Penegakan hukum internasional seolah menjadi tidak berdaya apabila pelaku kejahatan tersebut adalah Israel, sekutu terdekat AS. Betapa mudahnya Dewan Keamanan (*security council*) PBB memberikan resolusi untuk melakukan serangan militer ke Libya dan Irak atas

dasar kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Dengan mudahnya PBB mengeluarkan resolusi No. 1737 kepada Iran yang mewajibkan Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium dan pengembangan nuklir. Sebagai negara yang ikut menandatangani deklarasi *Nuclear Non-proliferation Treaty*, Iran berhak mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai. Apa yang bisa dilakukan oleh PBB atas kebrutalan Israel? Berikut beberapa resolusi PBB kepada Israel atas kekejamannya pada rakyat Palestina sejak puluhan tahun silam. Resolusi PBB No. 106, 29 Maret 1955: Mengutuk serangan Israel atas Gaza; Resolusi No. 592: Sangat menyesalkan pembunuhan mahasiswa Palestina di Bir Zeit University oleh pasukan Israel; Resolusi No. 672, 12 Oktober 1990: Mengutuk Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina di gunung al-Sharif; Resolusi No. 1860, 9 Januari 2009: Menyerukan penghentian penuh perang Israel dan Hamas.

Resolusi PBB yang hanya mampu mencela, menyesalkan, mengancam dan mengutuk mereka semakin menguatkan bahwa PBB memang tidak berdaya menegakkan *general principle of law* dalam hukum internasional terhadap Israel, termasuk agresi militer Israel kali ini. Meski 24 negara telah menyatakan dukungannya terhadap resolusi PBB termasuk India, China dan Rusia, namun tidak

dapat dipastikan apakah PBB berani memberikan resolusi yang lebih tegas terhadap Israel, mengingat AS menentang resolusi PBB tersebut dan sejumlah negara di Eropa memilih abstain. Tampaknya untuk jangka waktu yang lama Israel masih akan menjadi pembantai massal bagi warga Palestina. Menarik untuk disimak pernyataan Adolf Hitler terhadap orang Yahudi (Israel) “Saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini, tetapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup sehingga anda akan tahu apa yang saya lakukan”. Demikian pula pandangan Al Qur’an terhadap bangsa Yahudi, disebutkan dalam Q.S Al-Maidah (5): 78-79: “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (*)

PEMBEBASAN BERSYARAT YANG MELUKAI RAKYAT

Schapelle Leigh Corby, nama ratu marijuana ini kembali tenar justru ketika hubungan bilateral Indonesia dan Australia tengah dirundung sejumlah masalah. Belum lepas dari ingatan kasus penyadapan Australia pada pembicaraan telepon Presiden SBY dengan sejumlah pejabat negara dan kasus penggiringan imigran gelap asing oleh Australia ke wilayah perairan Indonesia, kini nama Corby mencuat kembali setelah Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan Corby. Sekadar mengingatkan kembali, Schapelle Leigh Corby adalah terpidana kasus narkoba yang

mendekam di LP Krobokan Bali setelah kedatangan membawa 4,5 kg marijuana di bandara Ngurah Rai Denpasar Bali pada tahun 2004 silam. Corby divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan pada tingkat banding hukumannya diringankan menjadi 15 tahun penjara. Selanjutnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hukuman Corby kembali diperberat menjadi 20 tahun penjara.

Melalui kuasa hukumnya Corby mengajukan permohonan grasi kepada Presiden dan hasilnya hukumannya diringankan menjadi 15 tahun penjara. Pemberian grasi tersebut tertuang dalam Keppres No. 22/G/2012. Selama mendekam di LP, Corby telah mendapatkan sejumlah remisi dengan potongan masa tahanan yang bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Total remisi yang telah diterima Corby mencapai 25 bulan masa tahanan. Menurut Kepala Lapas Krobokan Gusti Ngurah Wiratna, Corby mendapat remisi pengurangan masa hukuman selama 6 bulan bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2013. Pemerintah sendiri telah menuai kecaman dari sejumlah kalangan saat Presiden SBY memberikan grasi kepada Corby.

Jumat, 7/2, keputusan yang tidak populer dan melukai hati rakyat Indonesia terulang kembali setelah Corby diberikan pembebasan bersyarat oleh Pemerintah. Kepastian diterimanya pembebasan

bersyarat Corby itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di kantornya. Menurut Amir, pembebasan bersyarat kepada ratu marijuana tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidak ada yang spesial. Menkum HAM kembali menegaskan bahwa pembebasan bersyarat pada Corby bukan merupakan kemurahan hati Pemerintah, akan tetapi adalah hak yang telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, Corby memiliki hak yang sama dengan 1700 narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat dan diproses oleh Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP). Keputusan Pemerintah yang menerima pembebasan bersyarat tersebut sejatinya telah melukai rasa keadilan masyarakat di tengah gencarnya upaya pemberantasan narkoba.

Kejahatan narkoba adalah salah satu dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di samping kejahatan korupsi dan terorisme. Oleh karena sifatnya yang luar biasa dan dapat merusak generasi bangsa, maka penanganan kasus narkoba harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Presiden SBY telah mengeluarkan Inpres No. 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Badan Narkoba Nasional (BNN) bertugas untuk menjalankan Inpres tersebut.

Pemberantasan narkoba yang menjadi bagian dari kebijakan dan strategi nasional menandakan bahwa Pemerintah benar-benar berperang melawan narkoba dan tidak ada alasan untuk bersikap lemah dan tidak tegas terhadap sindikat jaringan peredaran narkoba internasional.

Namun faktanya berbeda jauh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri. Presiden justru inkonsisten terhadap Instruksi Presiden yang menyebutkan bahwa pemberantasan narkoba difokuskan pada upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan narkoba di dalam dan luar negeri secara sinergi. Berdasarkan data BNN, Indonesia berada pada posisi ke-empat di dunia dalam penyalahgunaan narkoba. Jumlah pecandu narkoba di Indonesia pada tahun 2013 di atas angka 4,9 juta jiwa dan angkanya semakin meningkat rata-rata 2-3 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Pada awal tahun 2015 jumlah pecandu narkoba telah melebihi angka 5 juta jiwa. Keadaan ini menjadi ironis karena 2,5 persen dari pengguna narkoba di Indonesia adalah pengguna dengan usia 10-20 tahun. Fenomena peningkatan pengguna narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori darurat penyalahgunaan narkoba.

Pemberian bebas bersyarat kepada Corby jelas telah melukai hati rakyat Indonesia. Pemerintah

seolah-olah ingin bertindak adil dalam penegakan hukum padahal keputusan pembebasan bersyarat tersebut adalah bukti lemahnya komitmen Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Jadi, wajar saja bila sindikat jaringan narkoba internasional semakin merajalela di Indonesia seperti jaringan narkoba Asia Tenggara dan jaringan pengedar narkoba yang berafiliasi dengan gembong narkoba di benua Eropa. Pengendalian bisnis narkoba yang dilakukan oleh terpidana narkoba dari balik tembok penjara semakin memperlihatkan betapa buruknya sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ketidaktegasan Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan inkonsistensi dari komitmen Pemerintah dalam perang melawan narkoba akan berakibat pada rusaknya generasi bangsa di saat mereka masih berada pada usia yang potensial dan produktif.

Keputusan Pemerintah memberikan pembebasan bersyarat kepada ratu marijuana Schapelle Leigh Corby terkesan sebagai upaya “cari muka” kepada Pemerintah Australia yang jelas-jelas menolak untuk meminta maaf pada Indonesia atas sejumlah perlakuan buruknya kepada Indonesia selama ini. Lalu, bagaimana reaksi dari negeri seberang (Australia) atas pembebasan bersyarat Corby? Sejumlah politisi di Australia menyatakan,

Corby jangan hanya dibebaskan tetapi segeralah dipulangkan. Benar-benar menyakitkan. (*)

BOIKOT ISRAEL ALA BELANDA

Medio Oktober 2011 di suatu siang yang cerah di Kota Utrecht, Belanda. Saat itu waktu setempat menunjukkan pukul 13.00 dan suhu berkisar 12 derajat Celcius, saya bergegas untuk shalat Jumat di salah satu masjid di Kota Utrecht, Belanda yang berjarak \pm 1 KM dari apartemen di *Bangkokdreef*. Cukup berjalan kaki tak lebih dari setengah jam untuk mencapai mesjid yg letaknya cukup dekat dari *Overvecht Shopping Center*. Berjalan kaki sejauh itu tidak perlu membuat saya harus kecapaian dan berkeringat, oleh karena hawanya

yang dingin dan udara kota yang sejuk. Berjalan di sisi deretan apartemen yang menjulang tinggi, rumah-rumah yang bentuknya hampir seragam, melintasi taman kota yang indah, dan menyeberangi jalan dengan sangat tertib di tempat yang telah ditentukan dan bersama para pejalan kaki lainnya saya mesti menunggu sampai lampu tanda boleh menyeberang menyala, meskipun sedari tadi lalu lintas tidak terlalu ramai dan saya dapat menyeberang jalan kapan saja. Tentu saya tidak ingin di-cap sebagai “orang tak berbudaya” hanya karena menyeberang jalan sembarangan.

Akhirnya saya sampai di *Masjied Anwar e-Qoeba* di bilangan *Kalimnosdreef*. Rupanya *Gemeente* (Pemkot) Utrecht cukup bijak dengan menempatkan masjid di lokasi yang sangat strategis ini. Sebelum memasuki lokasi masjid, tak sengaja saya menemukan sebuah brosur berbahasa Belanda yang dicetak sangat rapi dengan diksi yang sangat provokatif:

“Vergeet Gaza Niet. koop geen Israelische Dadels Boycot ISRAEL! Ze zijn afkomstig uit de illegal nederzettingen in de Jordanvallei. De winst uit de export van deze dadels helpt de besetting van Palestina te financieren. In Januari 2009 vermoordde Israel bijna 1500 Palestijnen waaronder veel kinderen. Vergeet Gaza 2009 niet! Boycot Israel! Palestina Vrij!”

Terjemahan bebasnya kira-kira begini: “*Jangan lupakan Gaza. Boikot Israel dengan tidak membeli kurma dari Israel. Kurma itu berasal dari pemukiman illegal di Jordanvallei. Pendapatan dari ekspor kurma ini akan digunakan untuk membantu invasi Israel atas Palestina. Pada bulan Januari 2009 Israel telah membunuh hampir 1500 warga Palestina termasuk anak-anak. Jangan lupakan peristiwa Gaza 2009. Boikot Israel! Bebaskan Palestina!*”

Wah, ternyata urusan boikot memboikot bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di Belanda juga ada! Kaget juga saya membaca selebaran yang menyerukan boikot Israel ini. Saya teringat beberapa kejadian serupa di tanah air seperti pemboikotan beberapa produk asal negara Israel dan atau para negara sekutunya seperti produk makanan, minuman, barang elektronik, pakaian dan lain sebagainya sebagai bentuk solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina. Tulisan ini sama sekali tidak akan menyinggung atau bahkan hendak berpolemik dengan aksi boikot terhadap sejumlah produk tertentu dari negara tertentu dan juga untuk tujuan tertentu pula. Tulisan ini akan mengungkapkan bahwa solidaritas terhadap sebuah kaum yang teraniaya ternyata juga menjadi keperdulian dari bangsa lain seperti yang terjadi di Belanda, nun jauh dari Indonesia. Ya, tak terbantahkan lagi asas *Dignity and Justice for all of Us*

(martabat dan keadilan bagi semua bangsa). *Article 1 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan dengan tegas: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.*" Semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sama kedudukan martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai dengan akal dan hati nurani dan bertindak satu sama lain dengan semangat persaudaraan.

Terharu membaca brosur ini seraya nurani berkata: "Saudaraku, engkau tidak sendiri. Tidak hanya Indonesia, bahkan sampai di Belanda sekalipun dukungan terhadapmu tetap mengalir. Hari-hari terakhir ini bangsa-bangsa di dunia masih berharap-harap cemas dengan upaya Palestina masuk menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat membuahkan hasil, sehingga harkat dan martabatnya sebagai sebuah bangsa dapat ditegakkan dan diperlakukan sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Amerika Serikat benar-benar gusar setelah Palestina remi menjadi anggota UNESCO, salah satu badan PBB yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan. AS mengancam akan menahan puluhan juta dollar pendanaan bagi UNESCO bila badan PBB tersebut setuju mengakui Palestina sebagai negara.

Palestina sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya. Palestina juga punya mimpi dan mimpi mereka saat ini adalah menjadi negara anggota PBB ke-194. Bila ingin menjadi anggota PBB, Palestina harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum melalui dua pertiga suara dari 193 negara – negara anggota PBB. Bantu mereka mewujudkan mimpi itu wahai saudaraku dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Bantulah Palestina untuk menegakkan martabatnya sebagai sebuah bangsa. *Everyone has the right to life, liberty, and security of person.* Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi (*Art. 3 Universal Declaration of Human Rights*).

Utrecht, 16 Desember 2011

KETIKA MENGHINA PRESIDEN TAK TABU LAGI

(Kado Akhir Tahun bagi Kalangan Aktivis
Prodemokrasi)

Ini mungkin kabar yang ditunggu-tunggu oleh para aktivis di negeri ini sebagai kalangan yang kerap mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintah. Pada akhir tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) membuat sebuah terobosan besar. Melalui Putusan majelis hakim yang diketuai oleh Prof Jimly Ash Shiddieqy pada tanggal 06 Desember 2006 lalu, sekarang masyarakat sudah “boleh” untuk

menghina Presiden! Mahkamah Konstitusi telah resmi membatalkan ketentuan Pasal 134, 136bis dan 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Presiden. Pasal-pasal tersebut termaktub dalam Bab II Buku Kedua KUHP yang mengatur tentang Delik Kejahatan (*misjudriven delict*) dalam hal Kejahatan Melanggar Martabat Presiden dan Martabat Wakil Presiden.

Para hakim MK menilai ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Beberapa pertimbangan hukum dari majelis hakim MK dalam amar putusannya antara lain adalah *Pertama*, Ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 28, 28D ayat (1) dan (3), dan 28E ayat (3). *Kedua*, Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang dapat mengurangi kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memperoleh informasi dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. *Ketiga*, Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 KUHP yaitu paling lama enam tahun penjara, dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi yang tengah dibangun, khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak boleh dihukum karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih.

Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP disebut juga sebagai Delik Penghinaan (*belediging delicten*). Pasal-pasal ini mengancam dengan hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja melakukan penghinaan dengan maksud untuk menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden. Penghinaan tersebut dapat berupa penistaan (*smaad*), penistaan melalui surat (*smaadschrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvodige belediging*), dan tuduhan memfitnah (*lasterlijke aanklacht*). Penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk pada siapa saja yang dengan sengaja menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya lebih diketahui oleh orang banyak.

Tentunya putusan MK ini merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi dunia hukum dan demokrasi di tanah air serta merta berbagai kalangan menganggap putusan MK tersebut adalah sebagai kemenangan para aktivis prodemokrasi. Tampaknya para aktivis harus berterima kasih pada Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis yang memohonkan gugatan uji materiel terhadap Pasal-pasal penghinaan Presiden tersebut. Eggi Sudjana

harus berurusan dengan hukum sehubungan dengan kasus penghinaan yang dilakukannya melalui rumor pemberian mobil Jaguar kepada salah seorang putra presiden dan orang-orang dekat presiden. Sedangkan Pandapotan Lubis menghadapi kasus serupa akibat dirinya mengusung poster SBY-JK “*Go Down*” pada saat berdemonstrasi pada tanggal 16 Mei 2006 di bundaran Hotel Indonesia Jakarta.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana bila seorang presiden mengalami penghinaan oleh seseorang maupun sekelompok orang? Nah, inilah letak terobosan hukum yang dilakukan oleh MK. Berdasarkan asas kesamaan di hadapan hukum, seorang presiden yang merasa terhina, sebagai seorang warga negara seperti warga negara lainnya dapat menggunakan instrumen hukum lain pasca dibatalkannya ketentuan tentang penghinaan terhadap presiden ini. Jika merasa terhina presiden dapat menggunakan Pasal 310 sampai 321 KUHP tentang Penghinaan.

Beberapa tahun silam, di Amerika Serikat pernah terjadi seorang senator (anggota parlemen) melaporkan salah seorang warganya dengan tuduhan penghinaan. Suatu ketika seorang warga telah menghina sang senator tersebut sebagai **Senator yang “gaptek”** atau gagap teknologi karena ia tidak dapat mengemudikan mobil. Kasus kemudian memunculkan berbagai opini dari

berbagai kalangan di negeri Paman Sam itu. Salah satu opini yang berkembang pada saat itu adalah “Penghinaan” yang boleh dilakukan kepada senator tersebut seharusnya adalah penghinaan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya, pernyataan-pernyataannya yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan/kenegaraan. Sedangkan “penghinaan” terhadap pribadinya adalah bukan dalam kedudukannya sebagai senator. Kedua hal inilah yang harus ditempatkan pada posisi yang semestinya.

Kembali ke pokok persoalan, rupanya hal seperti inilah yang membuat sebagian hakim MK tidak menyetujui putusan MK untuk membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penghinaan terhadap martabat Presiden-Wakil Presiden tersebut. Dalam *Dissenting Opinion*nya, mereka berpendapat bahwa martabat negara melekat dalam diri presiden sebagai kepala negara. Pembatalan Pasal-pasal tersebut justru akan membuat para penghina berlindung di balik kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Konstitusi menghormati dan menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tetapi tidak untuk pelaku penghinaan.

Namun demikian, di balik seluruh polemik yang terjadi berkaitan dengan pembatalan Pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil

presiden, Putusan MK ini patut untuk disambut gembira oleh semua pihak. Putusan MK ini ibarat “kado” akhir tahun bagi kalangan prodemokrasi. Ini adalah pertanda bahwa Indonesia sudah semakin dewasa dalam menerapkan proses demokratisasi. Kasus-kasus penghinaan terhadap presiden yang pernah terjadi dan memakan korban para aktivis seperti kasus Rosa Damayanti, Mukhtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lain tinggal menjadi kenangan buruk di masa lalu dan sebaiknya segera dilupakan atau dititipkan untuk dibawa oleh “kereta senja”.

Kini, tak ada lagi ketakutan dan kecemasan besar yang selalu menghantui benak para aktivis dalam melakukan aksi-aksi mereka untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah. Selamat kepada MK, Selamat datang era baru, dan untukmu para aktivis: **“Selamat ‘Menghina’ Presiden...”**.

TINDAK PIDANA KORUPSI



Sumber gambar:

<http://static.inilah.com/data/berita/foto/2054789.jpg>

SEREMONI PAKTA INTEGRITAS

Kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melibatkan Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka semakin menambah panjang daftar menteri aktif dalam jajaran Kabinet Indonesia bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng dan Menteri Agama, Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan hingga 9,9 miliar rupiah dengan modus meminta uang dari rekanan dan membuat rapat fiktif yang bertujuan untuk memperbesar dana operasional di Kementerian ESDM. Jero Wacik adalah salah satu dari sekian banyak pejabat yang menandatangani pakta integritas yang ternyata ditetapkan pula sebagai tersangka korupsi.

Pakta integritas (*integrity pact*) adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pakta integritas biasanya ditandatangani oleh para pejabat pasca pelantikan. Demikian pula dalam hal proyek pengadaan barang/jasa, pakta integritas ditandatangani bersama oleh para pihak seperti pejabat pengguna barang/jasa, pejabat/panita pengadaan dan penyedia barang/jasa. Setidaknya sebuah pakta integritas memuat empat poin penting: (1) Tidak akan melakukan praktik KKN; (2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN dalam sebuah proses pengadaan barang/jasa; (3) Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional serta mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal; dan (4) Apabila melanggar, bersedia untuk dikenakan sanksi moral,

sanksi administrasi, dan sanksi pidana serta dituntut ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pakta Integritas adalah sarana dan wahana pengejawantahan dari nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan dan komitmen moral yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang aparatur negara dan para pihak yang berhubungan dengan pembiayaan negara. Beberapa peraturan-perundang-undangan menjadi dasar filosofis dan yuridis dari sebuah pakta integritas seperti UURI No. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Ketetapan MPR-RI No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan KKN dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus senantiasa bersih dari unsur-unsur KKN. Oleh karenanya, sebuah pakta integritas sesungguhnya merupakan urgensi dari implementasi prinsip *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) untuk menuju hadirnya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah: Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebuah pemerintahan yang baik sangat mengedepankan terselenggaranya pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pada kenyataannya, banyak pejabat yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pakta integritas demikian pula banyak pejabat pengguna barang/jasa, panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang bersama-sama menandatangani pakta integritas, justru melakukan praktik KKN dan harus berurusan dengan hukum. Pakta integritas seolah hanyalah sebuah simbol dan syarat formal dari sebuah kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam kasus

dugaan korupsi Jero Wacik, Ketua KPK, Abraham Samad menyebut Jero tidak punya niat baik untuk mewujudkan sikap anti korupsi. Abraham menuding Jero Wacik adalah salah seorang pejabat yang suka bergaya hidup mewah. Menurut Ketua KPK ini, pakta komitmen (pakta integritas) hanyalah sebagai seremonial belaka.

Sudah saatnya pakta integritas tidak hanya menjadi seremoni tetapi benar-benar menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif. Penandatanganan pakta integritas harus disertai dengan komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip dasarnya antara lain: komitmen bersama anti korupsi dari Pemerintah dan swasta, transparansi maksimum, mekanisme perlindungan saksi, pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*), pemberian sanksi dan keberadaan lembaga pengawas independen. Penandatanganan pakta integritas diharapkan mampu mewujudkan citra penyelenggara negara yang bersih sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Oleh karenanya pakta integritas harus diikuti dengan pembenahan secara komprehensif di seluruh lini penyelenggaraan negara khususnya pada sektor-sektor pembiayaan yang rawan terjadi korupsi.

Bagaimanapun juga pakta integritas hanyalah sebuah ikrar di atas kertas yang tidak akan bermakna

tanpa diiringi dengan itikad yang luhur untuk melaksanakan janji tersebut. Keteladanan dari para pemimpin yang mendapat amanah sebagai penyelenggara negara merupakan kunci terwujudnya pakta integritas yang tidak hanya sekadar seremoni belaka sebagaimana pesan-pesan agama tentang pentingnya menepati janji. Dalam Q.S Al-Israa' (17): 34 dijelaskan: dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

TERTANGKAP TANGAN *(op Heterdaad Betrapt)*

Belum genap seminggu Hari Anti Korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2013 diperingati oleh segenap elemen bangsa Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sebuah “*Excellent strike*” dengan menangkap seorang pejabat hukum yang terlibat kasus penerimaan suap. Penangkapan ‘SUB’, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat oleh KPK pada Sabtu malam, 14/12/2013 di

sebuah hotel menambah daftar panjang pejabat di negeri ini yang ditangkap oleh KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa penangkapan oknum Kajari Praya tersebut adalah terkait dengan dugaan kasus suap perkara pemalsuan dokumen tanah di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini berawal dari informasi yang diberikan masyarakat kepada KPK. Bambang mengungkapkan terima kasihnya pada masyarakat atas partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ditangkapnya seorang oknum jaksa oleh KPK kali ini sesungguhnya bukanlah untuk yang pertama dilakukan oleh KPK. Pada bulan Maret 2008 silam, seorang jaksa Urip Tri Gunawan yang konon merupakan salah seorang jaksa terbaik tingkat nasional juga tertangkap tangan oleh KPK terkait dengan dugaan menerima suap sebesar USD 660.000 dari Syamsul Nursalim dalam kasus BLBI. Penangkapan tersebut berlangsung cukup dramatis karena jaksa Urip melakukan perlawanan saat akan ditangkap oleh penyidik KPK dan sejumlah personil brimob.

Cerita seru lainnya juga terjadi pada 29/06/2012 saat Bupati Buol Amran Batalipu tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan izin usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan seorang pengusaha Hartati

Murdaya Poo. Bagaimana adegan di film laga, sang Bupati berhasil diselamatkan oleh para pengawalnya dari kejaran petugas. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2012 Amran Batalipu ditangkap di kediaman pribadinya tanpa perlawanan. Masih segar pula dalam ingatan ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi R.I Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK di rumah dinas di Kompleks Widya Chandra tanggal 2 Oktober 2013 lalu atas dugaan suap pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak Banten.

Kejadian tertangkap tangannya sejumlah pejabat hukum dan pemerintahan di Indonesia atas dugaan menerima suap benar-benar menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks hukum pidana, perkara suap adalah salah satu tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya karena baik si-pemberi suap maupun si-penerima suap berupaya meniadakan dan bukti-bukti perbuatan mereka. Olehnya itu, pengungkapan sebuah kasus dugaan praktik penyuapan harus dilakukan dengan sebuah *'silent operation'* yang oleh KPK diistilahkan dengan 'OTT' (operasi tangkap tangan). Mengapa Operasi Tangkap Tangan perlu dilakukan oleh KPK? Dalam proses pembuktian sebuah perkara pidana dikenal adanya istilah: "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" yang artinya dalam perkara-perkara

pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Dengan melakukan operasi tangkap tangan, KPK akan menemukan segala bukti yang diperlukan dalam bentuk *fresh* (baca: basah) sehingga akan sangat mempermudah pembuktian perkara tersebut di Pengadilan.

Selain kasus tertangkap tangan yang disebutkan di atas, masih banyak lagi operasi tangkap tangan yang sukses dilakukan oleh KPK seperti penangkapan sejumlah pejabat pada Ditjen Pajak, penangkapan hakim Pengadilan Tipikor di Semarang dan Bandung serta penangkapan mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Khusus untuk kasus tertangkap tangan yang terakhir ini, menurut Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Adjat Sudrajat, jaksa Sub sebelum menjabat sebagai Kajari memiliki catatan yang cukup baik dalam perjalanan kariernya sebagai seorang jaksa. Bahkan sebelum menjabat Kajari, jaksa Sub pernah bertugas di gedung bundar Kejaksaan Agung sebagai anggota satgas yang menangani sejumlah kasus korupsi. Tidak mudah bagi seorang jaksa menjalankan tugas dan meniti karier hingga menjadi Kajari. Segala bentuk pendidikan peningkatan kualitas personil bagi seorang jaksa telah dilalui dan sejumlah jabatan sebelumnya telah diemban. Seharusnya penangkapan jaksa se-level Kajari oleh KPK dapat

menjadi momentum bagi kejaksaan untuk dapat memperbaiki diri.

Jika saja operasi tangkap tangan oleh KPK dianggap sebagai sebuah revolusi dalam penegakan hukum di Indonesia, akan muncul sebuah pertanyaan, *Kapankah akan berakhir?* Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab bagaikan iklan sebuah produk makanan: “*Panjang dan lama, dan lagi dan lagi...*”. Tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Ketika hukuman penjara tidak ampuh lagi untuk menjerakan para koruptor termasuk para pejabat penerima suap, maka gunakanlah cara-cara luar biasa lainnya untuk memberantas korupsi seperti pengucilan, pemiskinan dan bila perlu dijatuhi hukuman mati (Pasal 2 ayat (2) UURI No. 31 Tahun 1999)

Menarik untuk disimak untaian kalimat bijak Ranggawarsita (1802-1873):

*Mengalami zaman edan
Kita sulit menentukan sikap
Turut edan tidak tahan
Kalau tidak turut edan kita tidak kebagian
Menderita kelaparan
Tapi dengan bimbingan tuhan
Lebih bahagia yang ingat serta waspada.*

Semoga pimpinan KPK dalam ingat dan waspadanya dengan bimbingan Tuhan tetap gencar memberantas korupsi agar terwujud Indonesia yang *Baladatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofuur. Good Job KPK! (*)*

PIMPINAN BARU MK DAN HARAPAN RAKYAT

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai sebuah lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan.

Kehadiran lembaga ini dirasakan sangat penting guna mengawal konstitusi agar tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MKRI sekaligus untuk menjaga terselenggaranya Pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada perubahan (amandemen) III UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, keberadaan MKRI sebagai salah satu lembaga yudisial resmi dicantumkan pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Presiden Megawati Sukarno Putri pada tanggal 13 Agustus 2003 menandatangani pengesahan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN 2003 No. 98 dan TLN No. 4316). Momentum tersebut selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya MKRI.

Indonesia meneguhkan diri sebagai negara ke-78 di dunia yang membentuk MK sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk MK di abad XXI. Sebagai salah satu ikon reformasi, MKRI dapat dikatakan sebagai lembaga “*super body*” ke dua setelah KPK. Betapa tidak, MK berwenang untuk mengadili memutuskan sebuah perkara sesuai

dengan kewenangannya pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Seiring berjalannya waktu, eksistensi MKRI sebagai lembaga pengawal dan penegak konstitusi mengalami pasang surut. Banyaknya gugatan uji materiil sebuah Undang-undang terhadap UUD 1945 semakin menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan hak-hak konstitusional mereka. Di sisi lain, salah satu kewenangan MK yaitu memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (termasuk pemilu kepala daerah Prov/Kab/Kota) senantiasa membayang-bayangi dan menimbulkan keraguan apakah MK sebagai lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dapat “bebas” dari praktik-praktik penyuapan dari pihak-pihak yang berperkara.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diketahui, awal Oktober 2013 lalu sang pimpinan garda terdepan penegak konstitusi M. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK di rumah dinas di kompleks Widya Chandra bersama seorang anggota DPR RI dan beberapa orang lainnya termasuk suami Walikota Tangerang Selatan Hj. Airin Rachmi Diany. Berita ini tidak hanya mengejutkan seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga diliput di sejumlah media internasional seperti *The New York Times*, *The Washington Post* dan *Al Jazeera*.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan bertindak cepat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Substansi perubahan tersebut antara lain mengenai Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial, hakim konstitusi bukan dari partai politik dan membuat Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim MK.

Pada hari Jumat (1/11) Sidang etik Majelis Kehormatan MK memutuskan bahwa Akil Mochtar selaku hakim terlapor diberhentikan dengan tidak hormat dan telah terbukti banyak melakukan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang seharusnya tidak dilakukan oleh hakim konstitusi apalagi dengan kedudukannya sebagai Ketua MKRI. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor antara lain: (1) Menolak memberikan keterangan; (2) Sering meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan pada Setjen; (3) Terbukti bepergian ke Singapura untuk bertemu TCW, salah seorang tersangka kasus penyuapan; (4) Tidak melaporkan kepemilikan mobil mewahnya kepada Ditlantas Polda Metro Jaya; (5) Mengatasnamakan kepemilikan salah satu mobil mewahnya atas nama sopirnya untuk menghindari pajak progresif; dan (6) Kepemilikan 3 linting ganja

(tertutup) dan 1 linting ganja bekas pakai dan 2 butir pil *inex* yang menurut hasil pemeriksaan BNN melalui serangkaian tes, ternyata hakim terlapor positif menggunakannya.

Masih pada hari yang sama, sidang pleno hakim konstitusi MKRI memutuskan memilih Yang Mulia Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai Ketua MKRI dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai pimpinan MKRI yang baru. Meski sidang pleno majelis hakim MK terkesan sebagai “perlawanan” pada Perpu No. 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang mekanisme pemilihan hakim dan Ketua MK, namun sidang tersebut memutuskan memilih pimpinan MKRI yang baru untuk masa jabatan 2013 – 2016 dan akan dilantik pada Rabu, 06 November 2013.

Pimpinan baru MKRI yang baru saja terpilih mengemban tugas yang amat berat untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat yang runtuh akibat ulah oknum hakim konstitusi itu sendiri. Pimpinan baru MKRI harus mengembalikan kepercayaan dan menumbuhkan kembali harapan masyarakat di tengah keputusan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ibarat kata pepatah: *Gara-gara nila setitik, rusaklah susu sebelanga*. Akibat perbuatan segelintir orang, semua orang mendapatkan keburukannya.

Indonesian Legal Roundtable (ILR) pada tahun 2012 merilis Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia. Penilaian IPNH dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) indikator yaitu: Pemerintah berdasarkan hukum; Independensi kekuasaan kehakiman; Penghormatan, Pengakuan dan perlindungan HAM; Akses terhadap keadilan; Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan terbuka. Hasilnya? Dengan menggunakan skala 1-10, IPNH Indonesia hanya mencapai angka 4,53. Sebuah hasil yang kurang menggembirakan, ujar Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif ILR. Rendahnya IPNH Indonesia. Wakil Ketua MPR-RI, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa Indonesia “belum lulus” sebagai negara hukum.

Kembali ke persoalan MKRI, H.M. Laica Marzuki, mantan wakil ketua MKRI mengatakan bahwa kepercayaan publik pada MK runtuh dalam sedetik akibat perbuatan Akil Mochtar. Demikian pula Mahfud M.D, mantan Ketua MKRI mengatakan perlu segera untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar MK kembali menjadi badan peradilan yang disegani di tanah air. Masyarakat sudah sedemikian resah dan gelisah melihat fenomena praktik koruptif dan perilaku menyimpang lainnya dari para pejabat. Apa yang telah terjadi biarlah berlalu meski terasa sangat pahit. Semoga Pimpinan baru MKRI dengan

bimbingan tuhan dalam ingat dan waspadanya dapat memulihkan dan mengembalikan harapan rakyat. *Wallahu a'lam bisshawab.*

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA TIPIKOR
(*Omkering van de bewijslast*)**

Pada penghujung tahun 2013, Transparansi Internasional (*International transparency*) kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi pada suatu negara. Untuk mendapatkan skor IPK tersebut, dilakukan penggabungan sejumlah sumber data dari 13 lembaga internasional yang kredibel dan independen. IPK memiliki rentang skor dengan skala 1-100. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, maka semakin bersih negara tersebut dari perilaku koruptif para penyelenggara negara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 177

negara, Indonesia mendapatkan skor 32 atau sama dengan IPK tahun 2012. Menurut Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko, Indonesia termasuk dalam 70 persen negara-negara di dunia yang memiliki skor IPK di bawah 50.

Hasil IPK tersebut mendudukkan Indonesia pada peringkat ke 114 dunia atau naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia masih lebih baik dari Kamboja, Myanmar, Laos, Timor Leste dan Vietnam. Namun demikian, posisi Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Brunei, Malaysia, Philipina dan Thailand. Secara global negara yang memperoleh skor tertinggi adalah Denmark dan Finlandia dengan skor 91, sedangkan skor terendah IPK adalah 8 yang diraih oleh Afganistan, Korea Utara dan Somalia.

Bagi Indonesia, hasil survei IPK tersebut dengan perolehan skor yang sama dengan tahun lalu menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih *'jalan di tempat'* atau stagnan. Efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi masih belum optimal meskipun berbagai upaya telah dilakukan seperti melalui operasi tangkap tangan (OTT), pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan larangan untuk menerima uang atas pelayanan yang diberikan yang mengandung unsur gratifikasi. Masih banyak

ditemukan celah potensi korupsi pada institusi-institusi strategis pada bidang hukum, politik dan pemerintahan.

Pada bidang hukum, tahun 2013 lalu dapat disaksikan betapa para petinggi hukum dalam lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan sejumlah hakim yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam ketaatan terhadap hukum, ternyata harus menjadi ‘pesakitan’ dan diproses hukum akibat perilaku koruptif yang mereka lakukan. Pada institusi politik dapat disaksikan sejumlah elit politisi di Senayan dan di sejumlah daerah yang tersandung kasus skandal mega korupsi dan sejumlah uang hasil korupsi tersebut mengalir ke partai-partai politik mereka. Demikian halnya pada bidang pemerintahan. Sejumlah Gubernur, Walikota dan Bupati serta aparatur pemerintahan lainnya banyak yang tersangkut kasus korupsi. Kasus yang terbaru adalah ditahannya Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah atas dugaan sejumlah tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang terkesan stagnan memerlukan formula baru yang diharapkan dapat menaikkan skor IPK Indonesia di masa mendatang. Pada bidang pencegahan, perlu dilakukan penguatan integritas aparatur penyelenggara negara pada

sejumlah wilayah yang rawan korupsi. Beberapa titik yang rawan korupsi tersebut antara lain pada bidang perizinan, pajak, bea dan cukai, ekspor impor dan sejumlah pengadaan pada institusi-institusi negara. Penguatan integritas juga perlu dilakukan terhadap institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan menerapkan secara tegas asas Pembalikan Beban Pembuktian (*omkeering van de bewijslast*) yang sering diistilahkan dengan “pembuktian terbalik”. Pasal 37 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pembuktian terbalik namun sifatnya adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Maksudnya adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang harta benda miliknya dan keluarganya serta harta benda milik pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut J.E Sahetapy, wacana beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi telah berkembang dan menjadi topik pembahasan yang menarik sejak tiga puluh tahun lalu di dunia fakultas hukum. Hanya saja belum ada kata sepakat

tentang formula yang tepat dalam penerapan asas pembuktian terbalik ini. Sejumlah problematika hukum mengemuka seputar asas pembuktian terbalik seperti apakah beban pembuktian terbalik hanya diwajibkan ketika seseorang sudah berstatus terdakwa?. Jika beban pembuktian terbalik sudah diwajibkan pada saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka, akan ada kekhawatiran bahwa penyidik akan melakukan penyalahgunaan wewenang kepada tersangka kasus dugaan korupsi agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Meskipun demikian, pihak-pihak yang mendukung pembuktian terbalik sejak tahapan penyidikan mempunyai argumen bahwa apabila dilakukan secara benar, maka proses penanganan perkara korupsi akan berlangsung secara optimal dan cepat dalam artian ketika sumber perolehan harta tidak dapat dibuktikan oleh tersangka, maka proses hukumnya dapat segera dilanjutkan pada pemeriksaan perkara di Pengadilan, sebaliknya jika dapat dibuktikan perolehan harta tersebut, maka nama baik tersangka segera dapat dipulihkan.

Perbedaan pendapat tentang asas pembalikan beban pembuktian tersebut hendaknya mengerucut pada harapan agar pembalikan beban pembuktian ini dapat diatur dalam undang-undang tersendiri. Kehadiran undang-undang tentang Pembalikan Beban Pembuktian adalah sebagai upaya dalam

pemberantasan korupsi yang kian merajalela dewasa ini. Pembalikan beban pembuktian tidak hanya dilakukan pada saat ada perkara pidana tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabat bersangkutan, tetapi sejak berakhirnya masa jabatan hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seorang pejabat yang membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada awal masa jabatannya. Ketika menjabat selama lima tahun, ia memperoleh gaji 25 juta perbulan ditambah pendapatan lain yang sah menurut peraturan. Ketika masa jabatannya berakhir, ia harus melaporkan penambahan jumlah harta yang diperolehnya dengan perhitungan 25 juta dikali lima tahun ditambah pendapatan yang sah tersebut. Jika terjadi pertambahan jumlah kekayaan yang tidak wajar, maka ia terindikasi telah melakukan tindak pidana korupsi dan kepadanya diberikan kewajiban pembalikan beban pembuktian untuk menjelaskan tentang asal perolehan harta bendanya tersebut di luar dari pendapatan yang sah.

Korupsi merupakan sumber terbesar kehancuran sebuah negeri, dan janganlah sebutan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia menjadi predikat abadi yang diwariskan kepada generasi berikutnya. *Wallahu a'lam bisshawab.*(*)

MEMAKNAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Beberapa tahun lalu, masyarakat sedikit dikagetkan dengan terjadinya peristiwa bentrokan antara Forum Mahasiswa Toraja (FMT) dengan massa pendukung Bupati Tana Toraja Johannis Amping Situru. Kedua kelompok yang berbeda kepentingan ini, bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel sekitar pukul 11.15 Wita, tepat pada saat Amping Situru sedang menjalani pemeriksaan sehubungan dengan kasus adanya dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2003-2004 yang bernilai ± Rp. 3,8 miliar . Massa dari FMT yang mengaku mendukung langkah tegas Kajati Sulsel,

Mashudi Ridwan dalam menangani kasus korupsi tersebut menghendaki agar Bupati Toraja itu ditahan, namun di lain pihak massa pro Amping Situru menentang aspirasi tersebut dan menghalau massa FMT. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja, peristiwa demonstrasi beda kepentingan ini sempat memacetkan jalan-jalan di sekitar kantor Kejati Sulsel yakni di jalan AP. Pettarani dan Urip Sumohardjo disebabkan kedua kelompok terlibat aksi kejar-kejaran.

Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Amping Situru menampik tegas adanya dugaan bila dirinya telah mendatangkan sejumlah preman dan mengawalnya hingga ke Makassar. Dirinya juga membantah bila ia diduga telah mendatangkan massa ataupun preman ke kantor Kejati pada hari itu. Orang nomor satu di bumi LakiPadada ini menyatakan bila massa yang datang ke Kejati pada hari itu adalah sebuah aksi spontanitas dari warganya yang memahami dan mendukung bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Fenomena seperti bentrokan antar kepentingan dalam sebuah upaya penegakan hukum pada pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi seperti diatas, bukanlah suatu barang baru di tanah air tercinta ini. Beberapa faktor yang mendasari timbulnya fenomena tersebut antara lain adalah sebagai upaya untuk meneror para penegak hukum

(penyidik) agar mau menghentikan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan menerbitkan SP 3, sebagai upaya untuk menarik simpati masyarakat agar timbul opini masyarakat yang berempati atas diri pejabat atau mantan pejabat yang sedang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dan yang paling ekstrim adalah sebagai upaya untuk membuat opini di tengah masyarakat luas dan kemudian tujuan akhir yang diharapkan adalah “*happy ending*” yaitu penegak hukum (hakim) akan terpengaruh pada opini publik dan kemudian akan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspreek*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechts vervolging*) pada terdakwa kasus dugaan korupsi yang nota bene didominasi oleh kalangan pejabat ataupun mantan pejabat.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah: apakah peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu sebagai pendukung “si pejabat ataupun mantan pejabat” ataupun yang berseberangan dengan itu adalah sebuah **aksi spontanitas**? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, perlu diketahui bagaimana peraturan perundang-undangan terkait mengakomodir upaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 1971 No. 19, TLN No. 2958) telah memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat tersebut tertuang dalam Pasal 41 dan 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1999:

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberi informasi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
 - c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab atas pertanyaan tentang laporannya

yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal:

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada norma agama dan norma sosial lainnya;

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi;
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kembali ke pokok persoalan, apakah secara logika dapat diterima sebagai suatu aksi spontanitas apabila seorang pejabat ataupun mantan pejabat yang telah diperiksa untuk yang ketiga kalinya atau lebih, massa tetap rela datang berpanas terik dalam jumlah yang signifikan untuk hadir guna memberi dukungan kepada pejabat/atau mantan pejabat tersebut?. Kapan janjinya dan bagaimana proses mobilisasinya sehingga mereka dapat hadir pada waktu dan tempat yang sama? Semua itu perlu suatu “manajemen” khusus untuk mengaturnya.

Demikian pula halnya peranan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan diakomodirnya partisipasi masyarakat

untuk secara nyata memberantas tindak pidana korupsi dalam undang-undang, tidaklah ini merupakan “peluang emas” bagi oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengatasnamakan “masyarakat” untuk melakukan tujuan lain dibalik tujuan mulia yakni membantu pemerintah dalam memberantas korupsi? Tujuan lain yang dimaksud adalah dengan melakukan intimidasi kepada pejabat ataupun mantan pejabat dan melakukan praktik pemerasan agar kasus dugaan korupsi tidak dipublikasikan atau dilaporkan ke pihak berwajib.

Olehnya itu, perlu keberanian dari para pejabat yang kasusnya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah untuk menuntut balik oknum anggota LSM yang telah melaporkannya ke aparat penegak hukum, apalagi bila terindikasi bahwa laporan LSM tersebut memiliki tendensi khusus seperti akan melakukan praktek pemerasan dan sebagainya. Hal ini juga harus dilakukan oleh pejabat yang didatangi oleh oknum LSM yang akan melakukan praktek pemerasan disertai ancaman akan melaporkan dugaan penyimpangannya ke aparat berwenang. Aparat penegak hukum pun seyogyanya juga memproses laporan tersebut hingga ke tingkat pemeriksaan persidangan di Pengadilan. Ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelajaran

kepada oknum tersebut dan juga LSM lainnya untuk benar-benar memurnikan tujuannya dalam membantu Pemerintah memberantas tindak pidana korupsi tanpa embel-embel lainnya. Soal intimidasi, itu bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu dari oknum pejabat/mantan pejabat melalui melalui “orang-orangnya”, maupun dari oknum anggota LSM, apatah lagi bila oknum tersebut dikenal luas di lingkungan masyarakat sebagai sosok yang “angker”. Dengan demikian masyarakat juga memperoleh pembelajaran berharga tentang peran sertanya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi.

Marilah bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan dengan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesungguhnya akibat buruk dari tindak pidana korupsi antara lain adalah:

1. Menghambat terwujudnya pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat;
2. Menghambat pembangunan bangsa dan negara RI;
3. Dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi pada terciptanya situasi dan suasana yang tidak kondusif;
4. Merendahkan wibawa dan martabat bangsa di mata dunia internasional.

Semoga dengan peran serta aktif dari segenap elemen masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat menurunkan “klasmen negatif” Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

PENDIDIKAN



sumber gambar: <http://3.bp.blogspot.com/-SQdECwUFmhU/UAGPZupUBhI/AAAAAAAAAi0/t-fhN0VhBN0/s320/karikatur-un-siap.jpg>

OSPEK DAN MEMULIAKAN MANUSIA

(Catatan untuk Masa Orientasi Pengenalan
Kampus)

Beberapa hari yang lalu ramai diberitakan di media tentang bentrokan antara mahasiswa junior dan seniornya yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon) pada saat berlangsungnya kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek). Penyebabnya adalah mahasiswa baru tidak terima atas perlakuan kasar seniornya pada saat kegiatan berlangsung. Meski tidak mengakibatkan

korban jiwa, namun seorang mahasiswa terluka atas insiden tersebut. Kejadian kekerasan pada masa orientasi pengenalan kampus bukan yang pertama kali. Akhir tahun 2013 terjadi kekerasan pada mahasiswa baru Institut Teknologi Nasional (Malang) yang bahkan mengarah pada kekerasan seksual saat kegiatan Ospek di Desa Sumber Majing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pasca kegiatan Ospek penindasan senior terhadap juniornya juga kerap terjadi. Masih segar dalam ingatan pada bulan April 2014 terjadi kekerasan oleh senior di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan (STIP) Marunda Jakarta yang mengakibatkan tewasnya Dimas Dikita Handoko, seorang mahasiswa tingkat I yang mengakibatkan Ketua STIP Marunda Jakarta Utara, Rusman Husein dinon-aktifkan dari Jabatannya.

Konon di kalangan senior kampus ada “aturan internal” yang terdiri atas dua Pasal: (1) Pasal 1, Senior tidak pernah melakukan kesalahan apapun (2) Jika senior melakukan kesalahan, maka kembali ke Pasal 1. Mungkin inilah salah satu penyebab sehingga kekerasan terhadap junior masih menjadi nalar seorang senior dan selanjutnya seolah menjadi “agenda tahunan” yang kemudian menjadi sebuah tradisi. Lihatlah fenomena kekerasan pada saat Ospek yang terjadi di kampus-kampus di tanah air. Dengan dalih melatih fisik dan mental

mahasiswa baru, senior mereka melakukan berbagai bentuk penindasan mulai dari instruksi untuk berpakaian yang aneh-aneh mulai ujung kaki sampai ujung rambut, hingga perintah kegiatan fisik seperti berjemur, jalan jongkok bahkan yang paling tidak manusiawi adalah makan permen yang digilir dari mulut ke mulut para mahasiswa baru. Fenomena yang terjadi tersebut membuat sulit untuk menemukan benang merah relevansi antara kekerasan yang dilakukan pada saat berlangsungnya ospek dan kultur ilmiah yang melekat pada kampus.

Menteri Agama R.I, Lukman Hakim Saifuddin saat masih menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR-RI mengecam kegiatan Ospek yang sarat dengan perploncoan dan merendahkan martabat manusia. "Hampir tiap tahun tradisi itu menelan korban. Haruskah kita membiarkan tragedi itu berlanjut terus hingga lama-lama masyarakat menganggapnya hal lumrah?". Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo bertanya, "Apa haknya mahasiswa senior menguji fisik dan mental yuniornya dengan cara seperti itu? Dan, apa pula relevansinya dengan program studi?" Menurut Imam, cara-cara seperti itu hanya akan menimbulkan peradaban primitif di lingkungan kampus. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, "Pada prinsipnya tidak boleh ada kekerasan pada masa orientasi.

Kegiatan orientasi itu penting tetapi harus diisi dengan kegiatan yang relevan. Nuh menyebutkan, setidaknya terdapat tiga unsur yang harus ada pada kegiatan orientasi. Pertama, memperkenalkan nilai, budaya dan tradisi akademik di kampus. Kedua, Memperkenalkan struktur organisasi perguruan tinggi mulai dari rektorat hingga lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus. Ketiga, membangun silaturahmi antara senior dan mahasiswa baru.

Bagaimana model kegiatan orientasi pengenalan kampus di luar negeri? Kegiatan ospek di kampus-kampus yang sudah maju di luar negeri lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan ilmiah mulai dari seminar, simposium kegiatan untuk mendidik mahasiswa untuk menjadi pemimpin (*leader*) masa depan hingga testimoni dari para alumni yang sukses meniti karir. Sesungguhnya mahasiswa baru memang sangat perlu diberikan orientasi untuk pengenalan dunia kampus yang jelas sangat berbeda dengan saat mereka menempuh pendidikan di sekolah menengah sehingga kelak mereka memiliki cakrawala berpikir yang luas. Mahasiswa baru harus mengetahui berbagai dimensi dari kehidupan kampus seperti bagaimana cara belajar di perguruan tinggi, cara mencari literatur di perpustakaan, melakukan riset ilmiah, cara

berinteraksi dengan dosen dan cara memosisikan diri mereka sebagai bagian dari sivitas akademika.

Sudah saatnya paradigma kekerasan yang terjadi pada saat kegiatan Ospek diubah dan menghentikan pembodohan terhadap mahasiswa baru. Banyak materi pengenalan kampus yang seharusnya bisa menjadi program unggulan yang bisa diberikan kepada para mahasiswa baru seperti: Hak-hak Asasi Manusia (*human rights*), konstitusi dan demokrasi, kisah-kisah inspiratif dari orang-orang sukses, kearifan lokal (*local wisdom*) dan menumbuhkembangkan iklim wirausaha (*enterpreunership*) menuju kampus *enterpreuner*. Metode penyampaian bisa dilakukan melalui pemutaran film, ceramah, diskusi, permainan (*games*) yang menarik dan latihan keterampilan yang melibatkan kerja sama tim (*teamwork*). Melalui sebuah kegiatan ospek yang baik dan memuliakan manusia, maka akan diperoleh banyak manfaat seperti: Memperkaya wawasan keilmuan (*intellectual enrichment*), memiliki kebebasan akademik (*academic freedom*) dan memiliki sifat keterbukaan diri (*self awareness*) mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri.

Untuk direnungkan oleh para mahasiswa sebagai insan intelektual, pernyataan seorang tokoh mahasiswa Indonesia sepanjang masa, Soe Hok Gie (1942-1969):

"Masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah. Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi."

Hentikan pembodohan terhadap mahasiswa baru dan marilah memuliakan manusia!

PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA

(Refleksi Pemikiran Para Tokoh Nasional dalam
Konvensi Pendidikan Nasional 2014)

Penyelenggaraan pendidikan nasional adalah amanat konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV jelas dicantumkan mengenai pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara, dan UUD 1945 juga mengamanatkan pada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta ahlak mulia bagi bangsa Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dimaksud adalah suatu sistem

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Alangkah indahnya bila semua tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang dapat terwujud. Namun faktanya berkata lain, alih-alih menjadikan manusia Indonesia berahlak mulia namun yang terjadi adalah krisis dan dekadensi moral di mana-mana, Ingin menjadikan manusia Indonesia demokratis dan bertanggung jawab, yang terjadi malah kebebasan yang kebablasan, tidak bertanggung jawab dan anarkis. Ingin menjadikan manusia Indonesia kreatif dan mandiri, namun yang terjadi justru negara kita semakin tergantung pada negara lain seperti mengimpor beras dan bahan-bahan pokok lainnya yang seharusnya dapat di-*swasembadkan* oleh negeri kita sendiri sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaya saing rendah di tingkat global.

Fenomena tidak optimalnya tujuan pendidikan nasional (untuk tidak mengatakannya gagal), hendaknya semakin memacu lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas di bidang

pendidikan nasional dengan segenap *stakeholder* yang ada untuk melakukan evaluasi demi evaluasi agar terjadi perbaikan sistem pendidikan di masa yang akan datang. Beberapa waktu lalu penulis menghadiri Konvensi Pendidikan Nasional tahun 2014 yang digagas oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kompas Gramedia di Jakarta. Konvensi pendidikan tersebut mengusung tema: ***Pendidikan Indonesia dan Daya Saing Bangsa***. Para tokoh nasional yang hadir sebagai nara sumber pada konvensi tersebut adalah B.J. Habibie, mantan Presiden R.I, H.M. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden R.I, Marzuki Alie, Ketua DPR-RI dan Prof. Dr. Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup pada masa Orde baru, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Para tokoh nasional tersebut tampil dengan “gaya” dan pandangannya masing-masing seputar masalah pendidikan nasional saat ini. B.J Habibie menyoroti pentingnya sinergitas antara Budaya, Agama dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Budaya menjadi penting oleh karena budaya mencerminkan karakter bangsa yang sebenarnya dan Indonesia tidak boleh dipisahkan

dengan budaya asli bangsa Indonesia yang terdiri atas sekitar tujuh ratus etnis yang ada. Agama adalah sesuatu yang penting, oleh karena agama menjadi penopang dan pedoman hidup manusia. Habibie mencontohkan pengamalan nilai agama yang dilakukannya yaitu puasa Senin dan Kamis. Andaikata seluruh rakyat Indonesia dewasa yang beragama Islam menjalankan puasa Senin dan Kamis, maka akan sangat banyak beras yang dapat dihemat. Ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembangkan melalui industri-industri strategis. Menurut Habibie, dengan penguasaan Iptek, bangsa Indonesia akan semakin dikenal dan diakui oleh dunia Internasional dan menjadi bangsa yang berjaya.

H.M. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden R.I tampil sebagai nara sumber dengan berbagi pengalaman tentang tantangan yang dihadapinya ketika menjabat sebagai wakil Presiden pada saat menangani persoalan terkait pendidikan. Jusuf Kalla menyatakan, sejak awal saya sangat tidak setuju Ujian Nasional (UN) ditiadakan. Bagaimanapun kerasnya tekanan yang dihadapinya untuk meniadakan UN namun harus tetap dilaksanakan. Menurut Kalla, negara-negara lain yang merupakan negara maju juga menyelenggarakan UN mengapa justru Indonesia mau menghilangkan UN. Ketika *passing grade* UN ditetapkan pada angka “5” sekitar

40% peserta didik tidak lulus. Pada saat *passing gradenya* diturunkan, jumlah peserta didik yang tidak lulus semakin berkurang. Menurut Kalla, kondisi ini tentu tidak baik dan untuk masa-masa yang akan datang, *passing grade* kelulusan para peserta didik harus ditingkatkan secara bertahap misalnya 0,5 poin setiap tahun. Intinya menurut Jusuf Kalla, jika bangsa ini mau maju harus kerja keras. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa kerja keras.

Marzuki Alie, Ketua DPR-RI yang menjadi nara sumber berikutnya mengemukakan tentang perlunya Indonesia memiliki industri unggulan untuk memperkuat daya saing bangsa. Pada saat era perdagangan bebas diberlakukan, maka mau tidak mau Indonesia harus siap menghadapi keadaan tersebut. Bila Indonesia tidak memiliki industri strategis yang berdaya saing, maka produk-produk asing akan menguasai Indonesia dan penduduk kita hanya akan menjadi pengguna terbesar dari produk-produk asing tersebut. Oleh karena itu pentingnya untuk selalu dihayati dan diamalkan slogan “Cintailah produk-produk Indonesia”. Satu hal yang tak kalah penting menurut Marzuki adalah perlunya sesegera mungkin dilakukan sertifikasi atas profesi-profesi pendidikan dan keahlian yang ada agar tenaga-tenaga ahli Indonesia dapat bersaing dengan tenaga ahli dari luar. Dalam hal sertifikasi ini Indonesia masih ketinggalan dari negara-negara lain.

Masih banyak lagi pandangan dari para tokoh nasional dalam Konvensi Pendidikan Nasional yang tidak dapat diulas pada kolom yang terbatas ini. Intinya menurut mereka adalah pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Penulis sendiri berpendapat bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus dievaluasi secara komprehensif. Menurut data yang dirilis oleh UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2012, posisi Indonesia berada pada peringkat 124 atau menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya di posisi 121. Angka HDI ini sungguh memprihatinkan karena di tingkat regional, negara-negara tetangga mendapat peringkat yang lebih baik seperti Singapura: 18 dan Malaysia: 65.

Menyongsong hadirnya *Asean Free Trade Agreement* yang mulai diberlakukan pada tahun 2015, peningkatan daya saing bangsa harus dipacu dan semakin ditingkatkan. Bangsa Indonesia harus unggul dan berdaya saing tinggi di sektor barang, jasa, penguasaan IPTEK, profesi keahlian dan ketahanan pangan. Kelemahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia dewasa ini tidak lantas membuat bangsa Indonesia harus patah semangat. Profesi pendidik dalam hal ini guru dan dosen

adalah profesi mulia yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Tetap semangat insan-insan pendidik Indonesia, tetaplah menjadi pelita bagi anak bangsa, engkau bagaikan embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa (*)

